

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Laporan Keuangan**

Laporan keuangan menurut Baridwan (1994) merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan menurut Munawir (2004) laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil akhir proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk komunikasi antara data keuangan atau aktifitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktifitas perusahaan tersebut.

Berdasarkan informasi diatas, pada dasarnya laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan ringkasan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama 1 tahun buku dalam sebuah perusahaan. Laporan keuangan memberikan data mengenai informasi yang menggambarkan posisi dan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut IAC dalam SAK tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut, IAI (2003):

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. Disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non keuangan.
3. Menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen atau pertanggungjawaban manajemen akan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Adapun sifat dan keterbatasan laporan keuangan, adalah (Munawir, 2004) :

1. Laporan keuangan bersifat *histories*, merupakan kejadian yang telah lewat. Oleh karena itu laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu.
3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak lepas dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan.
4. Laporan keuangan hanya melaporkan informasi yang material.
5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan

yang tidak pasti mengenai penilaian laba bersih atau aktiva yang paling kecil.

6. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa atau transaksi dari pada bentuk hukumnya atau formalitasnya.
7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah terkait dan pemakai laporan keuangan dianggap memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilakukan.
8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam pengungkapan sumber-sumber ekonomis tingkat kesuksesan antara perusahaan.
9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantitatifkan umumnya diabaikan.

## **2.2. Corporate Governance**

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Shleifer dan Vishny (1997) mengemukakan bahwa *corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa *supplier* keuangan atau

pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau *return* dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau dengan kata lain bagaimana *supplier* keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer.

*Corporate governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham atau pemilik modal, komisaris atau dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika (Santosa, 2008).

Unsur-unsur *corporate governance* secara umum adalah:

- a. *Fairness* (keadilan), menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
- b. *Transparency* (transparansi), mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat dibandingkan, yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.
- c. *Accountability* (akuntabilitas), menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.

- d. *Responsibility* (pertanggungjawaban), memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial.

Secara umum, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* secara konkrit, memiliki tujuan terhadap perusahaan (Wardani, 2008) sebagai berikut :

- a. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
- b. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.
- c. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
- d. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari *stakeholders* terhadap perusahaan.
- e. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Dengan adanya penerapan *corporate governance* dalam suatu perusahaan maka menghasilkan suatu manfaat yang diperoleh, yaitu: (Wardani, 2008)

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *shareholders*.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.

- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan *dividen* khusus bagi BUMN akan membantu penerimaan APBN terutama dari hasil privatisasi.

### 2.3. *Leverage*

Rasio *leverage* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan *assets* atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost assets or funds*) untuk memperbesar *return* bagi perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa perusahaan dengan *leverage* yang tinggi menanggung biaya pengawasan (*monitoring cost*) yang tinggi. Jika menyediakan informasi secara lebih komprehensif akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi, maka perusahaan dengan *leverage* yang lebih tinggi akan menyediakan informasi secara lebih komprehensif. Ainun dan Fuad (2000) juga menyatakan bahwa perusahaan dengan rasio hutang atas modal tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan keuangan dari pada perusahaan dengan rasio yang rendah.

Perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* tinggi akibat besarnya jumlah utang dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki perusahaan, diduga melakukan manajemen laba karena perusahaan terancam *devault* yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya. Perusahaan

akan berusaha menghindarinya dengan membuat kebijaksanaan yang dapat meningkatkan pendapatan maupun laba (Widyaningdyah, 2001).

#### **2.4. Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan disini dinyatakan dengan ukuran besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari total aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Sesuai dengan ketentuan BAPEPAM No.11/PM/1997, disebutkan bahwa kategori perusahaan besar adalah yang total aktiva lebih dari Rp 100.000.000.000 sedangkan perusahaan kecil dan menengah total aktiva tidak lebih dari Rp 100.000.000.000.

Perusahaan besar yang mempunyai sumber daya yang besar pula akan melakukan pengungkapan yang lebih luas dan mampu membiayai penyediaan informasi untuk keperluan internal. Informasi tersebut juga sekaligus menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal seperti investor dan kreditor sehingga tidak memerlukan tambahan biaya yang besar untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas. Dengan demikian perusahaan besar mempunyai biaya produksi informasi yang lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil. Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dengan total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar (Sudarmaji dan Sularto, 2007).

## 2.5. Komite Audit

Peran komite audit sangat penting karena mempengaruhi kualitas laba perusahaan yang merupakan salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik dan dapat digunakan oleh investor untuk menilai perusahaan. Investor sebagai pihak luar perusahaan tidak dapat mengawasi secara langsung kualitas sistem informasi perusahaan, sehingga persepsi mengenai kinerja komite audit akan mempengaruhi penilaian investor terhadap kualitas laba perusahaan menurut Teoh et al, dalam (Suaryana, 2005).

Menurut Fisher (1994), dalam Wibowo menyatakan secara umum fungsi dari komite audit adalah:

1. Memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan penunjukan auditor eksternal termasuk didalamnya mengenai biaya audit beberapa pertanyaan mengenai persetujuan atau pembubaran kerja.
2. Melakukan diskusi dengan auditor eksternal mengenai sifat dan ruang lingkup audit, sebelum proses audit dimulai.
3. Mendiskusikan berbagai masalah yang menjadi bagian dari komite audit.
4. Melakukan masukan pada auditor eksternal mengenai hal-hal khusus yang menjadi perhatian komite seperti adanya transaksi-transaksi yang bukan bidang utama dari usaha perusahaan dan hal-hal yang secara signifikan memiliki resiko keuangan.
5. Melakukan koordinasi pelaksanaan audit antara auditor eksternal dan internal dan juga bila didalam perusahaan tersebut ada lebih dari satu auditor yang terlibat.

6. Melakukan *review* laporan keuangan tahunan sebelum dilaporkan ke dewan komisaris, khususnya mengenai:
  - a. Perubahan kebijakan dan praktek akuntansi.
  - b. Bidang yang membutuhkan penyelesaian-penyelesaian penting.
  - c. Asumsi untuk terus beroperasi (*going concern*)
  - d. Kegiatan yang sesuai dengan peraturan pasar modal dan peraturan hukum.
7. Meninjau surat dari manajemen auditor eksternal dan respon dari manajemen.
8. Meninjau hasil kerja auditor eksternal.

## **2.6. Kepemilikan Manajerial**

Kualitas laba yang dilaporkan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan isu yang penting dalam teori keagenan sejak dipublikasikan oleh Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan maka manajemen berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri.

Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi manajemen

laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba (Boediono, 2005).

## 2.7. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005). Cornet et al., (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri.

Kepemilikan institusional yaitu sahamnya dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam persentase. Variabel ini akan menggambarkan tingkat kepemilikan saham oleh institusional dalam perusahaan. Tingkat institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer (Wahidahwati, 2002).

Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak institusional yang memonitor perusahaan. Holderness dan Sheemun, Barclay dan Holderness, dalam (Faisal 2005) memberikan bukti empiris bahwa terdapat peningkatan perputaran (*turnover*) manajemen dan keuangan (*gains*) akibat pembelian saham oleh pihak luar. Cal et al, dalam (Faisal 2005) menemukan hubungan yang berlawanan antara kinerja saham dengan kepemilikan saham dengan kepemilikan saham institusional. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuan untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan, dengan demikian proporsi kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen.

## 2.8. Manajemen Laba

Manajemen laba dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. Manajemen laba dalam artian sempit ini didefinisikan sebagai perilaku manajer untuk "bermain" dengan komponen *discretionary accruals* dalam menentukan besarnya *earnings* menurut Sugiri, dalam (Widyaningdyah, 2001).

Agar kinerja perusahaan terlihat bagus, manajemen berusaha untuk mengatur laba, yaitu dengan melakukan manajemen laba. Ada berbagai cara dalam manajemen laba, diantaranya pemilihan metode akuntansi atau kebijakan akrual, tetapi cara yang paling sering dilakukan adalah dengan

kebijakan akrual atau *discretionary accruals*, yaitu dengan mengendalikan transaksi akrual sehingga laba terlihat tinggi. Akan tetapi, transaksi tersebut tidak mempengaruhi aliran kas, misalnya waktu dari pengakuan pendapatan sehingga kebijakan akrual akan dapat mempengaruhi kualitas laba suatu perusahaan. Transaksi akrual terdiri atas transaksi *non-discretionary accruals* dan *discretionary accruals*, transaksi *nondiscretionary accruals* misalnya biaya depresiasi, sedangkan transaksi *discretionary accruals* misalnya waktu dari pengakuan pendapatan menurut Roshan, dalam (Astuti, 2005).

Manajemen laba merupakan suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi menurut Schipper, dalam (Ujiantho dan Pramuka, 2007). Ada beberapa bentuk manajemen laba diantaranya adalah *taking a bath*, *income minimization*, *income maximization* dan *income smoothing*. *Taking a bath* digunakan selama periode *organization stress* atau reorganisasi. Jika manajer harus melaporkan kerugian, maka ia akan melaporkan dalam jumlah yang besar. Dengan tindakan ini manajer berharap dapat meningkatkan laba yang akan datang dan kesalahan atas kerugian perusahaan dapat dilimpahkan ke manajer lama, jika terjadi pergantian manajer. *Income minimization* dipilih selama periode dengan profitabilitas tinggi. Sehingga jika periode yang akan datang diperkirakan laba turun drastis, dapat diatasi dengan pengambilan jatah sebelumnya. *Income maximization* dilakukan manajer terutama untuk

tujuan syarat perjanjian utang juga untuk melakukan *income maximization*. *Income smoothing* dilakukan dengan meratakan laba investor, karena umumnya investor adalah *risk averse* dan menyukai laba yang relatif stabil menurut Scott, dalam (Kusuma dan Sari, 2003).

